

EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN POSO

Abdul Malik Saleh

amas_pozzo@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to determine the evaluation of the implementation of the legislative elections in Poso 2014. Technique of collecting data, by interview, documentation, and triangulation. Information retrieval techniques using purposive. The data analysis used the model Miles and Huberman. That are data reduction, data presentation and conclusion. The theory that used is the theory Bardach consist of four dimension, they are: technical feasibility, economy and financial possibility, political viability, and administration operability. Based on research result, that evaluating of the implementation of legislative elections in Poso 2014 is not effective, because from the four dimension according to Bardach, only two dimension that already met while the other two dimension have not been met. First, dimension of technical feasibility is already done accordance with applicable laws although in some cases still need improvement in the implementation of better legislative elections. Second, dimension of economy and financial possibility, that the operation cost are used in the implementation of the legislative election need to get the attention to provide additional cost operational so that the role of organizer can be implemented optimally. Third, political viability dimension, that all stages in the implementation of the election has been reached and implemented according to predetermined schedule. Fourth, administration operability dimension, that the impact problem on the implementation of legislative elections is less infrastructure and facilities in implementing the mission that are responsibility of the organizer.

Keywords: *Technical Feasibility, Economy and Financial Possibility, Political Viability, and Administrasi Operability*

Pemilihan umum untuk selanjutnya disebut dengan pemilu yang selalu diselenggarakan secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini juga dicantumkan didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan “pemilihan umum untuk selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna dari kedaulatan rakyat tersebut adalah pertama

rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Kedua rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988:329) mengatakan bahwa: pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang

menyebutnya sebagai negara yang demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.

Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut KPU adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diatur pada Pasal 22E, Angka 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan amanat konstitusi. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran Hatta tentang demokrasi (untuk Indonesia) dalam Suleman (2012:183) yaitu: kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaannya yang nyata dengan demokrasi barat.

Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara yang demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik, wilayah Negara Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar dan menebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Dalam hal ini diharapkan penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu

terlepas dari pengaruh serta kepentingan dari pihak manapun. Adapun yang menjadi peserta pada pemilu legislatif tahun 2014 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah 15 partai politik. Sedangkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada undang-undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu dan bahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan supaya pemilu benar-benar dapat dilaksanakan berdasarkan asas pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun yang menjadi pengawas untuk selanjutnya disebut Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Paswaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pembentukan Pengawas Pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Dengan adanya pengawasan terhadap penyelenggara pemilu dari dalam dan dari luar lembaga penyelenggara diharapkan pemilu dapat terlaksana dengan demokratis dan memenuhi asas pemilu. Pada tahapan pelaksanaan pemilu, Bawaslu baik di pusat maupun di daerah berhak melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu dan juga terhadap penyelenggara pemilu. Apabila dalam tahapan pemilu ditemukan adanya pelanggaran maka panwaslu akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Pada pemilu legislatif tahun 2014 KPU telah menetapkan partai politik yang menjadi peserta pemilu yaitu terdiri dari 12 (dua belas) partai politik Nasional dan 3 (tiga) partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun nama dan nomor urut partai politik nasional pada pemilu legislatif tahun 2014 adalah:

1. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Damai Aceh (PDA)
12. Partai Nasional Aceh
13. Partai Aceh
14. Partai Bulan Bintang (PBB)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Partai Politik sebagai peserta pemilu menunjuk anggota ataupun kader partai untuk menjadi calon legislatif. Untuk dapat memperoleh kursi legislatif partai politik dan calon legislatif harus bisa mendapatkan dukungan suara dari pemilih. Untuk mendapatkan perolehan suara yang maksimal dari pemilih, partai politik dan calon legislatif

akan melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan kampanye atau sosialisasi kepada pemilih.

Kabupaten Poso yang terdiri dari 19 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan 156 pada pemilu legislatif tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik Nasional memperebutkan 30 kursi DPRD Kabupaten, terdapat 584 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap 145,619 memperebutkan 30 kursi yang dibagi menjadi 4 daerah pemilihan (DAPIL) dengan rincian:

1. Dapil I, meliputi Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Utara, Poso Kota Selatan dan Kecamatan Lage memperebutkan sebanyak 9 kursi
2. Dapil II, meliputi Kecamatan Pamona Utara, Pamona Puselemba, Pamona Barata, Pamona Timur, Pamona Tenggara dan Pamona Selatan memperebutkan sebanyak 11 kursi
3. Dapil III, meliputi Kecamatan Lore Peore, Lore Timur, Lore Barat, Lore selatan dan Lore Tengah memperebutkan sebanyak 4 kursi
4. Dapil IV, meliputi Kecamatan Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan dan Poso Pesisir Utara memperebutkan sebanyak 6 kursi

Kabupaten Poso pada pemilu legislatif tahun 2014 telah terjadi beberapa masalah sehubungan dengan tahapan penghitungan, seperti; pemilihan ulang di Kecamatan Pamona Puselemba di karenakan adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, pelanggaran administrasi di TPS 3 Kelurahan Poso Kota yaitu terdapat pemilih yang menggunakan KTP yang tidak sesuai domisili dapat menggunakan hak suaranya, TPS 6 Kelurahan Poso Kota Utara yang menggunakan SIM diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih, di Kecamatan Poso Pesisir Selatan di TPS 7 Desa Pantangolemba KPPS sudah mulai melakukan perhitungan suara sebelum waktu yang ditentukan (13.00).

Berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan pemilu 2014 telah terbukti terjadi pelanggaran yang tidak dapat dihindarkan, baik menyangkut pelanggaran administratif, maupun pelanggaran pidana pemilu. Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama pemilu tidak semua kasus dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti yang disebabkan antara lain ada pembatasan waktu yang sangat terbatas, sehingga kasus-kasus tersebut dibiarkan begitu saja, karena secara hukum tidak mungkin diselesaikan sehingga pada akhirnya kadaluwarsa (sumber data Panwaslu Kabupaten Poso 2014)

Fakta lain, pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Poso belum sesuai yang diharapkan dengan peraturan perundang-undangan, apabila dikaitkan dengan teori Bardach, yang terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu: *Technical Feasibility* (kelayakan teknis), *Economy and Financial Possibility* (peluang ekonomi dan finansial), *Political Viability* (daya dukung politis) dan *Administrative Operability* (daya dukung administratif). Ada beberapa aspek yang belum terpenuhi sehingga pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Poso tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti aspek *administrative operability* yang mana aspek ini melihat pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Poso belum sesuai yang diinginkan kriteria ini dapat dilihat dalam banyaknya pelanggaran administrasi. Selanjutnya aspek *economy and financial possibility* aspek ini terkait dengan minimnya anggaran yang disediakan untuk mendukung kinerja penyelenggara pemilu

Berdasarkan uraian di atas, dengan melihat kondisi yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Poso, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Poso”.

A. Konsep Kebijakan Publik

Pada dasarnya kata *policy* secara etimologis berasal dari kata *polis* yang dalam bahasa Yunani (*greek*) yang berarti negara-kota. Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi *politia* yang berarti negara. Masuk ke dalam bahasa Inggris lama (*the middle English*), kata tersebut menjadi *policie* yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn dalam Abidin, 2012:4)

Menurut Knoepfel dkk dalam Wahab (2012:10), mereka mengartikan kebijakan sebagai: “*a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one*”. (serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik atau pemerintah maupun privat atau swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus perhatian kita saat ini mempelajari atau menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekedar pada apa yang dipikirkan atau ingin dilakukannya. Jika ditelusuri, semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecahan masalah), artinya setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah korektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*governmental agenda*).

Lasswell dalam Parsons (2011:17) mengatakan bahwa: “Kata “kebijakan” (*policy*) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil

baik dalam kehidupan organisasi atau privat”kebijakan” bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering kali diyakini mengandung makna “keberpihakan” dan “korupsi”.

Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan juga merupakan salah satu alat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengikat seluruh komponen bangsa didalamnya. Oleh karena itu kebijakan merupakan Administrasi Negara, karena di dalam administrasi Negara melibatkan perumus dan pelaksanaan kebutuhan publik.

B. Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang begitu panjang. Seperti yang dikemukakan oleh Anderson dalam Subarsono (2011:12-13) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*Problem formulation*): apa masalahnya? apa yang membuat masalah tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*Adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? dan apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*Implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan?

apa yang mereka kerjakan? apa dampak dari isi kebijakan?

5. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? apa konsekuensi dari adanya kebijakan? adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Selanjutnya Thomas R. Dye dalam widodo (2010:16-17) mengemukakan proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*) dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*) merupakan tahapan pengusulan dirumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif
4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri konsultan diluar pemerintah, dan masyarakat (public).

Berdasarkan proses kebijakan diatas, dapat dipahami bahwa: kebijakan publik terdiri dari berbagai tahapan untuk memecahkan masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Proses kebijakan publik ini berkaitan dengan apa

yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

C. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Dari beberapa pandangan mengenai evaluasi yang salah satu mempertahankan konsep evaluasi sebagai fungsi organik manajemen dan administrasi adalah S.P. Siagan (1997:108) yang mengemukakan bahwa: Evaluasi atau penilaian adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir. Definisinya adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya tercapai". Selanjutnya Adi Nugroho, (1997:128) mengemukakan bahwa: "Evaluasi atau pengawasan merupakan suatu proses menjamin bahwa tujuan-tujuan manajemen telah tercapai atau belum, dengan demikian suatu evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan suatu kerja yang dilakukan sebelumnya. Tanpa adanya proses evaluasi, maka suatu pekerjaan akan berakhir tanpa ada hasil yang berarti".

Berdasarkan pengertian evaluasi tersebut, dapat dipahami bahwa evaluasi adalah kegiatan yang saling berkaitan yang dimulai dari proses perencanaan sampai akhir kegiatan. Dengan demikian kegiatan evaluasi merupakan upaya untuk mengembangkan nilai-nilai standar yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dengan nilai pelaksanaan yang pada akhirnya dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

D. Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik, dalam tahapan pelaksanaannya menggunakan pengembangan beberapa indikator untuk menghindari timbulnya bias serta sebagai pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik. Bardach dalam Keban (2004:66) mengemukakan beberapa kriteria penting yang dapat digunakan yaitu:

1. *Technical feasibility*, Feasibilitas teknis yang meliputi prosedur yang harus dipenuhi dari suatu program yang di evaluasi. Menyangkut penyediaan informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya. Pada konteks ini terdapat dua ukuran yakni efektifitas program yaitu kemampuan tercapainya tujuan kebijakan sedangkan *adequacy* (kecukupan) yakni kemungkinan solusi pemecahan berdasarkan ketersediaan sumber daya dalam program tersebut.
2. *Economy and financial possibility*. Peluang ekonomi dan finansial dari kebijakan atau program. Pengukurannya mencakup yaitu pertama, biaya program yang diperlukan untuk melaksanakannya kedua keuntungan yang dihasilkan dari program yang dilaksanakan. Ukuran untuk ini menyangkut *tangible* (dapat dilihat jelas) *and in tangible, monetarizable versus non monetarizable dan direct versus indirect cost benefit*.
3. *Political viability*. Daya dukung politik yakni dukungan politik yang mewarnai setiap tahapan proses evaluasi. Kebijakan dibangun dalam arena politik. Karenanya harus cukup mendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagai konsekuensinya, alternatif kebijakan selanjutnya berfokus pada aspek-aspek yang mengandung nilai-nilai/penilaian politik.
4. *Administrative operability*. Mengukur seberapa besar kemungkinan penerapan secara nyata dari kebijakan atau program yang diusulkan dalam konteks politik, sosial dan yang terpenting adalah permasalahan administrasi yang meliputi wewenang, komitmen kelembagaan, kapabilitas dan dukungan organisasional yang menyangkut fasilitas fisik dan lain-lain dukungan.

E. Pengertian Pemilihan Umum Legislatif

Negara Indonesia merupakan negara hukum di mana dalam mewujudkan demokrasi yang konstitusional harus ada rule of law yang dinamis. Pemikiran tentang negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant seorang guru besar dari Rusia, namun dalam perkembangannya negara hukum mengalami perubahan yang cukup signifikan. International Commission of Jurist yang merupakan suatu organisasi ahli hukum Internasional merumuskan bahwa untuk mewujudkan negara yang demokratis di bawah rule of law maka dibutuhkan syarat-syarat dasar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (1980:60) sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang menjamin,
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals),
3. Pemilihan umum yang bebas,
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat,
5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Dari rumusan tersebut sangatlah jelas bahwa dalam sistem politik yang demokratis maka pemilu merupakan salah satu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi dalam mewujudkan demokrasi perwakilan. Pemilu tidak hanya berfungsi untuk memilih wakil rakyat saja namun lebih dari itu pemilu memiliki fungsi-fungsi lain dalam suatu proses kenegaraan yang sangat signifikan. Setidaknya ada empat fungsi utama pemilu dalam mekanisme sosiopolitik dan kehidupan bernegara, menurut Arbi Sanit (1998:192) yakni: 1) Pembentukan legitimasi kekuasaan dan pemerintahan. 2) Pembentukan perwakilan politik rakyat. 3) Sirkulasi elit penguasa. 4) Pendidikan politik rakyat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemilu adalah merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada peralihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Sesuai ketentuan pasal 22 E ayat (6) UUD 1945 tentang pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima (5) tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

METODE

Pada tahap ini peneliti menjelaskan dasar penelitian yang akan digunakan sebagai cerminan dasar perancangan penelitian dalam rangka mendapatkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain kualitatif. Sedangkan tipe penelitian pada prinsipnya adalah merupakan pengklasifikasian penelitian berdasarkan atas tujuan penjelasan terhadap konsep penelitian yang ingin dicapai. Dengan demikian, tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi saat ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, diantaranya yaitu, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Jumlah informan dalam penelitian ini 5 orang. Teknik penarikan informan menggunakan *Purposive*, yaitu suatu teknik penarikan

informan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara sengaja memilih orang-orang yang memahami dan mengerti tentang objek penelitian. Model interaktif dalam analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Idrus (2009:147-151), yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan, adalah aktivitas yang hanya mengevaluasi aktivitas atau kegiatan tertentu, dimana dalam konteks penelitian ini aktivitas atau kegiatan tersebut adalah aktivitas atau kegiatan pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Poso yang meliputi dari: Tahapan persiapan, yang termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang perubahan keempat atas peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang meliputi: penataan organisasi; pendaftaran pemantau dan pemantaun; pembentukan badan penyelenggara; seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota; rapat kerja, rapat koordinasi dan bimbingan teknis disetiap tingkatan; sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih; pengelolaan data dan informasi; dan logistik.

Selanjutnya setelah melalui tahapan penyelenggaraan tahapan selanjutnya adalah tahapan penyelesaian yang meliputi: Perselisihan hasil pemilu; penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu; penyusunan dokumentasi; pengelolaan arsip; pembubaran badan-badan penyelenggara *ad hoc*; dan penyusunan laporan keuangan.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Poso peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Bardach, dengan indikator sebagai berikut:

1. Technical Feasibility

Technical Feasibility atau Feasibilitas teknis meliputi prosedur pelaksanaan pemilu yang harus dipenuhi dari suatu kegiatan yang dievaluasi. Menyangkut penyediaan informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program yang ada dalam undang-undang sehingga dapat diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ukuran dan standar kinerja sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 di kabupaten poso telah berjalan sesuai dengan harapan selaku penyelenggara, walaupun ada TPS yang melakukan pemilihan ulang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara sehingga dapat menghasilkan kualitas pileg sesuai dengan yang diharapkan baik itu pada tingkat penyelenggara, peserta maupun masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pileg di Kabupeten Poso telah bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan menurut peneliti bahwa pelaksanaan pileg di Kabupaten Poso tahun 2014 sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

2. Economy and financial possibility

Untuk mengukur dimensi *Economy and financial possibility*, Bardach melihat dari peluang ekonomi dan finansial dari kebijakan/program. Ada beberapa aspek pengukurannya seperti biaya (anggaran) program yang diperlukan untuk melaksanakannya dan keuntungan yang dihasilkan dari program yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa anggaran pelaksanaan masih minim, sehingga perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa

memaksimalkan anggaran yang dibutuhkan penyelenggara dalam penyelenggaraan pileg. Sementara itu, menurut peneliti bahwa memang ada beberapa Desa di Kabupaten Poso yang membutuhkan biaya operasional yang lebih untuk memaksimalkan kinerja penyelenggara. Bertitik tolak dari penjelasan diatas, menurut hemat peneliti bahwa biaya operasioanal yang terkait dengan pelaksanaan pileg perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar sebisa mungkin memberikan penambahan biaya operasional sehingga tugas pokok dan fungsi penyelenggara dapat terlaksana secara maksimal. Alasan informan tersebut diatas mengatakan bahwa anggaran yang nilainya Rp. 3.751.000.000. masih minim karena ada beberapa kegiatan yang belum terakomodir dan membutuhkan biaya salah satunya seperti kegiatan sosialisasi di daerah-daerah terpecil.

3. Dimensi *Political Viability*

Dimensi *Political Viability* diartikan dengan daya dukung politik yakni dukungan dari aktor yang mewarnai setiap tahapan proses evaluasi. Kebijakan dibangun dalam arena politik karenanya harus cukup mendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagai konsekuensinya, *alternative* kebijakan selayaknya berfokus pada aspek-aspek yang mengandung penilaian politik. Ukuran yang peneliti pakai untuk mengukur *political viability* dalam hal ini berkaitan dengan didukungnya kebijakan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*), para pejabat atau aktor terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilihan legislatif di Kabupaten Poso.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan bahwa dalam pelaksanaan pileg, sangat dibutuhkan situasi yang kondusif sehingga para penyelenggara tidak memiliki kekhawatiran akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka semua penyelenggara sangat merespon dan mendukung setiap kebijakan yang dapat

memberikan rasa aman dan damai dalam tahapan pileg. Menurut peneliti, bahwa pelaksanaan pileg yang ada di Kabupaten Poso sudah mengacu pada peraturan yang telah disepakati bersama dan monitoring dari tiap-tiap pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang sangat penting untuk terlaksananya pileg secara jujur dan adil. Seperti apa yang dilakukan para penyelenggara pileg. Sementara menurut peneliti, bahwa proses pengawasan yang dilakukan penyelenggara pileg sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti pengawasan yang dilakukan oleh KPU dan Panwas terkait dengan tahapan pemilu. Selan itu, sosialisasi yang dilakukan para penyelenggara pileg juga tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan penyelenggara.

4. *Administrative Operability*.

Dimensi *administrative operability* ini mengukur seberapa besar kemungkinan penerapan secara nyata dari kebijakan atau program yang diusulkan dalam konteks politik, sosial dan yang terpenting adalah permasalahan administrasi yang meliputi wewenang, komitmen kelembagaan, kapabilitas dan dukungan organisasional yang menyangkut tugas dan fungsi penyelenggara. Dari hasil wawancara, dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Sementara itu informasi yang peneliti peroleh dari anggota panwascam bahwa pelanggaran penyelenggaraan pemilu sudah di proses sesuai dengan prosedur penanganan. Olehnya itu, pemahaman secara umum bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pada tahapan pemilu memiliki ketetapan hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara sehingga semua tahapan bisa berjalan sesuai dengan jadual yang sudah ditentukan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Pelaksanaan

Pemilihan Legislatif di Kabupaten Poso tahun 2014 yang dikaji peneliti dengan menggunakan teori bardach dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dimensi *Tehnical Feasiility*, bahwa *Tehnical Feasiility* sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dimensi *Economy and Financial Possibility*, bahwa biaya operasioanal yang terkait dengan pelaksanaan pileg perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar sebisa mungkin memberikan penambahan biaya operasional sehingga tugas pokok dan fungsi penyelenggara dapat terlaksana secara maksimal.
3. Dimensi *Political Viability*, bahwa keseluruhan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilihan telah tercapai dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Dimensi *Administrasi Operability*, bahwa kendala-kendala yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, yaitu masih kuangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab sebagai penyelenggara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Poso tahun 2014, yaitu:

1. Diharapkan dimensi *Tehnical Feasibility* yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dimaksimal secara terus-menerus.
2. Diharapkan bahwa biaya operasional yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan legislatif perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar sebisa mungkin memberikan penambahan biaya operasional, sehingga tugas pokok dan fungsi penyelenggara dapat terlaksana secara maksimal.

3. Diharapkan, bahwa keseluruhan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilihan yang telah tercapai dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dapat di pertahankan.
4. Diharapkan adanya penambahan dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab sebagai penyelenggara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyadari dalam penulisan artikel ini tidak mustahil jika di temui banyak kekurangan dan kelemahan. Hal ini disebabkan karena sangat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman peneliti, akan tetapi dengan terus bermodalkan semangat, ketekunan dan pantang menyerah, serta bimbingan dan arahan dari Dr. Hi. Irwan Waris , M.Si pembimbing I dan Dr. Hi. Sastrio Mansyur, M.Si. selaku pembimbing II, akhirnya penulisan artikel ini dapat diselesaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin Zainal Said, 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2009 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Keban Yeremias T, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Miles B. Matthew dan Huberman 2007, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*. Universitas Indonesia press, Jakarta.
- Nugroho Riant, 1997. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Parsons Wayne, 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Siagian S.P. 1997. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Gunung Agung . Jakarta

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 *tentang* Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, *tentang* Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wahab Abdul Solichin, 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke*

Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara. Jakarta.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.